

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Barda nawawi arief, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. V. Jakarta: Prenamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2002. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- CST. Kansil 1993, *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Ctk.9, Jakarta: Balai Pustaka
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah.2009 *.Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Cet.II. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta: Raja Grafido Persada.
- Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.Bandung. PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Evi Hartanti, 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gunadi dan Efendi, 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- H. Jawade H. Arsyad. 2013, *KORUPSI dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Lilik Mulyadi, 2004, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori- Teori dan kebijakan pidana*. Cet.IV. Bandung: P.T Alumni
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: UNDIP
- Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Surabaya:Kencana Prenadamedia Group.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Hukum Pengantar Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rommelink Jan, 2003, *Hukum Pidana - Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama.
- Rawls, John. 2005. *A Theory of Justice (edisi revisi)*. Cambridge: Belknap Press.
- Soedarto.2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cet.V. Bandung: PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana.Alumni*, Bandung: Alumni.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### B. Sumber Internet

<https://kumparan.com/@kumparannews/icw-penindakan-korupsi-di-semester-i-2018-turun-dibanding-tahun-lalu-1537261985332266676>.

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2261-pencegahan-lebih-banyak-selamatkan-uang-negara>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> .

#### C. Undang- Undang

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.  
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Nomor 74).

Undang- Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara RI nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3209).

Undang- Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 3874).

Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 4150).

Undang- Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137).

Undang- Undang RI nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (Lembaran Negara RI nomor 85, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4654).

Undang- Undang RI nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.  
(Lembaran Negara RI nomor 5, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4335).

Undang- Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
(Lembaran Negara RI nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286).